LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Mei 2025

JUDUL

"TANGIS BAHAGIA (PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS GIAT PARIWISATA)"

Fokus Strategis

Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tim Ahli

Dr. I Nyoman Sudipa, ST.M.Si

Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Dalam Bab II, Pasal 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Bab III, Pasal III dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, disebutkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : (a) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (d) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, yang salah satunya adalah program pro-rakyat memfokuskan pada (a) program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; (b) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; (c) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 1. Kelompok

program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. 2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain ketiga instrumen di atas, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Adapun program pro-rakyat (Klaster IV) dilakukan melalui : (a) Program Rumah Sangat Murah; (b) Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; (c) Program Air Bersih Untuk Rakyat; (d) Program Listrik Murah dan Hemat; (e) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan; (f) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia menghadapi triple-track problem, yaitu : (1) kemiskinan yang meskipun terus menurun namun penurunannya melambat, (2) kerentanan kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK, (3) terjadinya kesenjangan, baik kesenjangan antar wilayah/provinsi (wilayah timur dan wilayah barat) maupun kesenjangan pendapatan/konsumsi antar penduduk secara keseluruhan dan antar penduduk miskin (indeks keparahan kemiskinan). Dengan permasalahan tersebut penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan akselerasinya. Kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan perumusan definisi kemiskinan merupakan sesuatu yang problematik pada tataran konsep maupun praktis tentang siapa yang dapat dianggap sebagai penduduk miskin, serta banyak hal tentang kehidupan masyarakat miskin bahwa mereka memiliki akses pasar dan kualitas infrastruktur yang terbatas. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan minimum, yang dikenal sebagai garis batas kemiskinan atau garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yaitu : garis kemiskinan makanan dan non makanan. Menurut Badan Pusat Statistik, nilai standar kebutuhan minimum makanan mengacu pada harga dan tingkat konsumsi dari 52 jenis bahan makanan dengan batas kecukupan makanan yang mampu menghasilkan energi 2.100 kalori/kapita /hari, sedangkan non makanan terdiri dari 27 paket komoditi untuk perkotaan dan 25 komoditi untuk perdesaan yang dalam hal ini mewakili pola konsumsi penduduk kelas bawah, dengan batas kecukupan non makanan ditetapkan sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan oleh penduduk kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum non makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan aneka barang jasa lainnya (Badan Pusat Statistik, 1999). Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat

kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. BPS pada tahun 2005 melakukan pendataan/sensus kemiskinan yang dikenal dengan Program Sensus Ekonomi (PSE'05), yang hasilnya berupa Rumah Tangga Miskin. BPS juga melakukan pendataan pada tahun 2008 dan tahun 2011 dikenal dengan istilah Program Perlindungan Sosial (PPLS) dengan hasil berupa Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dalam tiga periode pendataan/sensus kemiskinan ini, BPS menggunakan pendekatan 14 (empat belas) variabel kemiskinan. Pada tahun 2015 kembali dikeluarkan data kemiskinan dalam format Basis Data Terpadu dengan pendekatan 40% penduduk berpenghasilan terendah. Untuk menentukan suatu rumah tangga layak atau tidak dikategorikan miskin terdapat 14 (empat belas) variabel kemiskinan yang dapat dikaitkan dengan pendekatan normatif kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non makanan sebagai dasar penetapan garis kemiskinan. Namun setelah melalui kajian yang mendalam berdasarkan uji statistik hasil survei BPS beberapa tahun, pada tahun 2005 menunjukkan bahwa ke 14 (empat belas) variabel ini yang memenuhi hubungan sangat erat atau paling representatif untuk menjelaskan kriteria rumah tangga miskin, yaitu: 1. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 2. jenis lantai tempat tinggal dari tanah atau bambu atau kayu murahan. 3. jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok atau plesteran. 4. tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. sumber air minum bersumber dari sumur atau mata air yang tidak terlindung atau dari sungai atau air hujan. 7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. 8. hanya mengonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam seminggu. 9. hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10. hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. 11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. 12. sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 5000 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 13. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar atau hanya sekolah dasar. 14. tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Kabupaten Klungkung dalam penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan lapangan kerja bagi rumah tangga miskin produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Berkembangnya pariwisata di Klungkung dan Nusa Penida pada khususnya mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diamantkan bahwa tujuan pembangunan pariwisata salah satunya adalah untuk menghapus kemiskinan. Inovasi daerah "Tangis Bahagia (Pengentasan Kemiskinan Berbasis Giat Pariwisata) menawarkan solusi untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara menjadikan anggota rumah tangga miskin produktif sebagai anak asuh para pengusaha di bidang pariwisata dengan cara melatih dan menjadikan anggota rumah tangga miskin produktif sebagai karyawan terdidik sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.

I. Maksud dan Tujuan

a) Menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dunia usaha dalam upaya pemberdayaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

b) Menciptakan lapangan kerja bagi anggota rumah tangga miskin produktif.

c) Meningkatkan keterampilan dan kesempatan anggota rumah tangga miskin produktif untuk bekerja di sektor pariwisata.

d) Melandasi pelaksanaan ”Inovasi Tangis Bahagia” dengan payung hukum

II. Ide dan Gagasan

Perkembangan pariwisata di wilayah Klungkung khususnya Nusa Penida telah mampu mengangkat pendapatan daerah Kabupaten Klungkung. Dengan Visi Klungkung Mahottama dengan salah satu program unggulannya menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 3 persen pada Tahun 2030, maka program penanggulangan kemiskinan merupakan program penting dalam pembangunan Klungkung lima tahun ke depan. Persentase penduduk miskin pada Tahun 2024 sebesar 5,3 persen dan mengalami penurunan sebesar 5,61 pada Tahun 2023. Intervensi program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil terus dilakukan, akan tetapi program peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin penting dilakukan sebagai asupan tambahan untuk menjamin keberlanjutan hidupnya. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah melatih dan mempekerjakan anak dari rumah tangga miskin di Kabupaten Klungkung telah berjalan, akan tetapi program ini tidak cukup dilakukan, karena masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki akses lapangan pekerjaan. Inovasi " Tangis Bahagia" bisa dijadikan rujukan untuk menanggulangi kemiskinan dengan mempekerjakan anggota rumah tangga miskin produktif di dunia pariwisata untuk memutus mata rantai kemiskinan dan pewarisan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai pemegang kebijakan, bisa memberikan arahan dan membuat kebijakan dengan melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kabupaten Klungkung untuk mempekerjakan anak dari keluarga miskin bekerja di akomodasi pariwisata. Langkah ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klungkung sesuai amanat Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana salah satu tujuan pariwisata yaitu menghapus kemiskinan.

Proses pelaksanaan meliputi :

1. Identifikasi rumah tangga miskin yang memiliki anak sedang bersekolah atau sudah lulus SMA/SMK sederajat.
2. Identifikasi anak dari rumah tangga miskin yang sedang bersekolah atau sudah lulus SMA/SMK sederajat yang sudah bekerja.
3. Identifikasi anak dari rumah tangga miskin yang sedang bersekolah atau sudah lulus SMA/SMK sederajat yang belum kerja bekerja.
4. Membangun kerja sama dengan PHRI Kabupaten Klungkung untuk bisa menyalurkan anak dari rumah tangga miskin yang sedang bersekolah atau sudah lulus SMA/SMK sederajat yang belum kerja bekerja untuk bisa bekerja pada akomodasi pariwisata di Kabupaten Klungkung.
5. Melakukan pemantauan terhadap anak dari rumah tangga miskin yang sudah bekerja di akomodasi pariwisata.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

III. Rekomendasi

Inovasi ”Tangis Bahagia (Pengentasan Kemiskinan Berbasis Giat Pariwisata), bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 19 Mei 2025
Disahkan oleh:
Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

